

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Sukma Ayu Mahardika
sukmaayumahardika@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and examine the effect of Local-own Source Revenue and General Allocation Fund on the capital expenditure with the economic growth as the moderating variable. While, the population was all-district of East Java Province. Moreover, there were 114 data of Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and Central Bureau of Statistics (BPS) 2015-2017 as sample. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used documentation. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded Local-own Source Revenue did not affect the capital expenditure of all districts/ local governments of East Java Province. On the other hand, General Allocation Fund had affected the capital expenditure of all districts/ local governments of East Java Province. Additionally, economic growth had moderated Local-own Source Revenue and General Allocation Fund on the capital expenditure of all districts/ local governments of East Java Province.

Keywords: capital expenditure, local-own source, general allocation fund, economic growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan sampel penelitian sebanyak 114 data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2015 hingga 2017. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang mengenai sistem pemerintahan yang relevan terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Sistem pemerintahan yang awalnya dianut oleh Indonesia ialah sistem sentralisasi dan sudah diubah menjadi sistem desentralisasi atau dikenal sebagai sebutan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan lebih meluas pada daerah dan lebih nyata terutama dalam mengatur, menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Pada hakekatnya memberikan peluang untuk mengoptimalkan

suatu potensi daerah baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang didalamnya sudah termasuk sebagai kekayaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih semakin mandiri lagi dan berguna untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat baik, dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri Nomor 25 Tahun 2009) dimana belanja daerah menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu otonomi daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara merata dan adil agar relatif dapat bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum Kawedar et al. (2008). Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran rutin yang dilakukan untuk pembelian atau pembangunan suatu aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk pembelanjaan modal yang dimaksud seperti mesin, peralatan, tanah, jalan, bangunan, irigasi dan aset tetap lainnya.

Peningkatan belanja modal akan berdampak pada produktivitas masyarakat dan juga dapat menambah jumlah investor melakukan investasi yakni guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kawedar et al. (2008) menyatakan bahwa Belanja daerah adalah pemberian pelayanan umum terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi yang dapat dinikmati secara relatif dan dialokasikan secara adil dan merata. Selama ini manajemen keuangan daerah sangat memperhatikan dalam masalah anggaran daerahnya, khususnya belanja daerah yang belum mampu untuk berperan secara intensif dalam mendorong suatu laju pembangunan daerah. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Asyaidah (2015) yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang transfer juga berpengaruh terhadap belanja modal. Abdullah dan Halim (2004); Deller dan Maher (2005); dan Maimunah (2006) menyatakan bahwa secara teoritis, perubahan pendapatan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu penambahan dari pendapatan tersebut akan dialokasikan seluruhnya dalam kegiatan belanja. Aspek ekonomi, efektifitas dan efisiensi kurang mencerminkan dan tidak dilakukan secara hati-hati sehingga pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan pengguna dan kebutuhannya. Hal ini disebabkan, karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Pada hakekatnya, kemampuan pada setiap daerahnya tidak sama dalam program mendanai berbagai kegiatan, hal tersebut sangat menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan lainnya. Untuk mengatasi peristiwa sebelumnya sebagai pemerintah pusat harus dapat lebih mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah atas pelaksanaan desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan maka akan dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah itu sendiri. Dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah ini tidak hanya membutuhkan sumber daya yang baik tetapi dari kemampuan keuangan daerah yang sudah memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut dapat di ukur juga dari besarnya penerimaan yang khususnya terdapat pada pendapatan yang dapat di peroleh dari suatu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh sendiri dan dipungut sendiri oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan dan bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, bertujuan untuk memberikan kesempatan pada daerah untuk menggali suatu pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerahnya dan untuk perwujudan suatu asas desentralisasi.

Besar kecil perolehan dari belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, jika pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat ialah dengan meningkatkan belanja modal daerah. Masalah yang terjadi dalam pembiayaan daerah akan mengalami dampak pada peningkatan yang terjadi oleh ketimpangan pendapatan asli daerah (PAD). Widiyanto (2013) memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal. Jika semakin besar kontribusi dari pendapatan asli daerah pada APBD maka kemungkinan kecil ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. Kaitan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal merupakan sumber dari pembiayaan untuk anggaran belanja modal, pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian tidak semua daerah yang berpendapatan diatas rata-rata diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Dana alokasi umum ialah bertujuan agar pemerataan keuangan antar daerah yang dapat mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa proporsi dana alokasi umum (DAU) terhadap penerimaan daerah dalam beberapa tahun berjalan masih yang paling tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lainnya termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Kaitan yang terjadi pada dana alokasi umum dengan belanja modal merupakan dari sumber pembiayaan yang digunakan untuk belanja modal guna untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kelayakan suatu pelayanan publik yang lebih baik lagi. Hal yang dapat membedakan pada DAU dan PAD ialah jika, DAU diperoleh dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan PAD diperoleh dari pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Oktora dan Pontoh (2012) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum pengaruh positif terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Heru (2016) juga memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah aceh.

Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah harus lebih akuntabel dan transparan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bagi pemerintah daerah dengan optimalisasi anggaran dan mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi didaerah diprosikan dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pertumbuhan ekonomi ialah pertumbuhan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan produktivitas yang disebabkan karena adanya kenaikan tersebut akan mencerminkan tambahan pendapatan dan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Permanasari (2013) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan yang merupakan dari kegiatan ekonomi yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga meningkatkan suatu kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih mampu dalam mendorong pembangunan daerah, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal didaerah tersebut. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk : (1) menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal; (2) menguji secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal; (3) menguji secara empiris pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi yang mempengaruhi pendapatan asli

daerah terhadap belanja modal; (4) menguji secara empiris pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi yang mempengaruhi dana alokasi umum terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Teori keagenan ialah teori yang terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*Principal*) pada Manajemen Perusahaan (*Agent*) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan suatu pengambilan keputusan dari agen tersebut. Pembuatan keputusan oleh Manajemen Perusahaan (*Agent*) harus dapat menerima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan kesekuensinya. Teori keagenan ini juga merupakan sebuah persetujuan (Kontrak) antara dua belah pihak yaitu *Principal* dan *Agent*. Kaitan *agency theory* pada penelitian ini dilihat dengan melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana daerah atau transfer dana pada pemerintah daerah. Diantaranya ialah hubungan yang terdapat pada pemerintah daerah antara masyarakat (*Principal*) dengan Pemerintah Daerah (*Agent*).

Hubungan tersebut mengalami keterjadian dimana ketika satu atau lebih individu yang disebut *Principal* menyewa individu atau organisasi lainnya dan yang disebut sebagai *Agent* adalah untuk melakukan jasa dan pendelegasian kewenangan untuk memberikan keputusan kepada *Agent* (Brigman dan Houtson, 2006:26). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *Principal* dan *Agent*. Rerangka hubungan *Principal* dan *Agent* merupakan pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Halim dan Kusufi (2012:21) berasumsi bahwa APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu atas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas maupun plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas maupun plafon anggaran kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam prespektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete ontract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yutikasari, 2007). Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan dilakukan secara tahunan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memiliki pedoman yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang, memiliki arah dan petunjuk yang digunakan dalam membuat, menyusun dan menetapkan peraturan pengeluaran pendapatan dana sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah suatu penerimaan dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berasal dari ekonominya sendiri yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah juga merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah yang menjadi modal utama dalam pembangunan dan

pembiayaan belanja daerah, dalam menjalankan suatu otonomi daerah sebagai kabupaten atau kota dituntut untuk mampu meningkatkan suatu pendapatan asli daerahnya yang menjadi suatu tolak ukur dalam mewujudkan dan menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan dari ketentuan undang-undang disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang paling utama adalah dari pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Sehingga, dapat melaksanakan suatu pembangunan ekonomi dengan baik dan sebagai pemerintah daerah dapat dituntut untuk tetap dapat mengoptimalkan dan meningkatkan suatu hasil dari pajak daerah dan retribusi daerahnya. Sumber pendapatan asli daerah yang sah diantaranya : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” mendeskripsikan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai dari kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat “*Block Grant*” dimana para penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk meningkatkan suatu pelayanan pada masyarakat dalam hal otonomi daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pada daerahnya. Putro (2008) mengatakan bahwa dana alokasi umum adalah pendapatan dari pemerintah pusat yang pengalokasiannya sebagai bentuk dari pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan suatu daerah yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum yang manfaatnya melebihi dari satu tahun anggaran, dimana akan menambah suatu aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya juga mendapatkan penambahan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya operasional pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut bahasa ekonomi mikro investasi didefinisikan tidak sama dengan bahasa ekonomi makro dan berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Menurut bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja atau biaya, investasi muncul karena dari perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Pada dasarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah untuk membeli aset tetap demi kebaikan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk memenuhi suatu fasilitas publik yang merupakan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana.

Dalam ASP, jenis belanja modal yang dikategorikan terdiri dari 5 bagian, diantaranya adalah : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

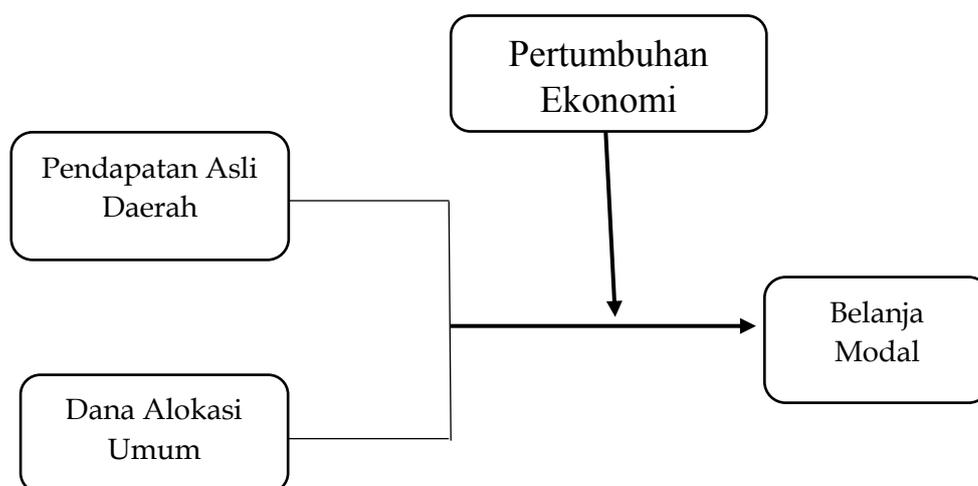
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana suatu negara mengalami perubahan dari kondisi perekonomiannya yang secara langsung berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Meningkatnya suatu pertumbuhan ekonomi akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Salah satu ukuran yang paling terpenting dalam konsep ekonomi ialah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimana untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada internasional atau nasional.

Permanasari (2013) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan yang merupakan dari kegiatan ekonomi yang berdampak pada jumlah

produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga meningkatkan suatu kemakmuran masyarakat. Kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa jika ingin meningkat maka dapat didukung oleh faktor-faktor produksi yang meningkatkan suatu kualitas dan jumlah dengan baik (Fauziny, 2013).

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai sumber dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Setyanda dalam Zakhya (2011) berpendapat jika pertumbuhan ekonomi disuatu negara akan menyediakan jumlah yang sangat banyak pada kebutuhan barang dan jasa, memungkinkan akan menaikkan standar hidup yang berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka yang sangat panjang.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian Permata (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh daerah dan digunakan untuk sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembangunan sarana dan prasarana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang melalui biaya belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Peneliti dari Oktora dan Pontoh (2013) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Dan begitu juga sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi dan Rachmawati (2015) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal yang berpengaruh secara positif.

Dana alokasi umum tersebut berguna untuk alur percepatan dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga digunakan dalam membagikan biayanya untuk keperluan dari daerahnya yang telah membutuhkan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat

menggunakan dana perimbangan keuangan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) yang berguna untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan dengan melalui belanja modal.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Ngurah Panji dan Dwiranda (2012) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Begitu juga dengan Sugiardi dan Supadmi (2014) membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi merupakan dari salah satu tujuan suatu proses pembangunan yang sedang berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang baik ialah dengan didukungnya sebuah infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga juga dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka pendapatan asli daerah dan belanja modal akan meningkat.

H₃: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal

Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dana alokasi umum pada belanja modal. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Jika, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah harusnya dapat meningkatkan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Sejak diterapkannya suatu desentralisasi fiskal, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga tidak hanya mengandalkan dari dana perimbangan dari pemerintah pusat.

H₄: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini ada 29 Kabupaten dan 9 kota dengan 3 tahun periode data pengamatan mulai dari 2015 hingga 2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Beberapa kriteria penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menyertakan Laporan realisasi APBD dan tabel PDRB dari tahun 2015 hingga 2017; (2) Memiliki data yang sangat lengkap untuk pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2015-2017 dan tabel PDRB provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan Kristina (dalam Salmiwati, 2012) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah untuk mendapatkan suatu dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah, pendapatan asli daerah adalah usaha daerah yang gunanya untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah dalam mendapatkan suatu dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota yang menyajikan datanya dalam bentuk Laporan Realisasi APBD.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum ialah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utamanya untuk pemerataan kemampuan keuangan dari antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota yang menyajikan datanya dalam bentuk Laporan Realisasi APBD.

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah penambahan aset tetap yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk dari biaya pemeliharaan dan memiliki fungsi untuk menambah masa manfaat dan meningkatkan kualitas dan kapasitas aset dengan cara melakukan pengeluaran dan perbelanjaan. Belanja Modal (BM) dapat dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota yang menyajikan datanya dalam bentuk Laporan Realisasi APBD.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita. Analisis pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui suatu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan suatu keberhasilan atau kesuksesan pemerintah daerah dalam melakukan sesuatu yang telah dicapainya. Data di peroleh dari (www.bps.go.id). Data dilihat dari tabel PDRB di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah cara untuk memecahkan suatu masalah penelitian melalui pengolahan data yang menjadi informasi. Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu dengan cara mengolah, mengumpulkan data dan menganalisis penarikan kesimpulan yang dijadikan dalam perancangan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan dari fakta dan analisis yang dilakukan. Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi komputer melalui program SPSS.

Analisis dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Dari pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun pada tahun 2015 sampai tahun 2017, maka hasil analisis SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	97926818089.250	4709645546043.000	410000764859.738	663484533932.934
DAU	114	382373637000	1709892845000	929323273651.56	294768204515.816
BM	114	151188508601.000	2844371811527.000	541619123350.833	383789856145.737
PE	114	4819.1	495043.3	49120.099	75503.5570
Valid N (listwise)	114				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat pengolahan data menghasilkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi atas variabel penelitian yang digunakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 114 data observasi yang digunakan mulai tahun 2015-2017 sebagai berikut : (1) Pada tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 97.926.818.089.25 yang diperoleh oleh Kota Batu. Pendapatan Asli Daerah dengan data tiga tahun memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 410.000.764.859,73 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 663.484.533.932,93. nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari mean, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ada perubahan peningkatan/tidak normal; (2) Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 382.373.637.000 yang diperoleh oleh Kota Mojokerto. Dana Alokasi Umum dengan data tiga tahun memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 929.323.273.651,56 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 294.768.204.515,81. nilai standar deviasi Dana Alokasi Umum lebih kecil dari mean, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak ada perubahan peningkatan/normal; (3) Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 151.188.508.601 yang diperoleh oleh Kota Blitar. Modal Belanja dengan data tiga tahun memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 541.619.123.350,83 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 383.789.856.145,73. nilai standar deviasi Modal Belanja lebih kecil dari mean, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak ada perubahan peningkatan/normal; (4) Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 4.819,1 yang diperoleh oleh Kota Blitar. Pertumbuhan Ekonomi dengan data tiga tahun memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 49.120,10 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 75.503,55. Nilai standar deviasi Pertumbuhan Ekonomi lebih besar dari mean, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ada perubahan peningkatan/tidak normal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis, penggunaan model regresi perlu diperhatikan adanya kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, karena pada dasarnya jika pada asumsi uji diagnostic tidak memenuhi, maka variabel-variabel yang dijelaskan menjadi tidak efisien. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari empat uji asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Autokolerasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedasitas. Perhitungan untuk keempat uji asumsi klasik tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Uji Normalitas :

Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari taraf signifikan ($\alpha = 5\%$). Hasil pengujian dengan *Kolmogorov-Smirnov* dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001440
	Std. Deviation	127774826499.529
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.060
Test Statistic		2.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.260 ^c

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Berdasarkan hasil penelitian, maka nilai *Asymp. Sig* PAD, DAU, PE dan BM adalah 0,260 lebih besar daripada sig ($\alpha = 0,05$), Hal ini dapat dikatakan data tetap terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig* variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari pada taraf signifikan.

Uji Multikolinearitas

Identifikasi secara statistik mengenai ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila nilai *tolerance* ≥ 10 dan nilai *VIF* ≤ 10 maka model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistic Tolerance	VIF
PAD	.025	4.447
DAU	.529	1.891
PAD*PE	.051	1.709
DAU*PE	.045	2.106

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan pada lampiran, menunjukkan bahwa besarnya nilai *tolerance* ≥ 10 dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka dari seluruh variabel telah memenuhi kriteria, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk data *time series* atau data yang mempunyai seri waktu. Pada hasil analisa data yang diperoleh melalui uji asumsi klasik tentang autokorelasi dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Autokorelasi

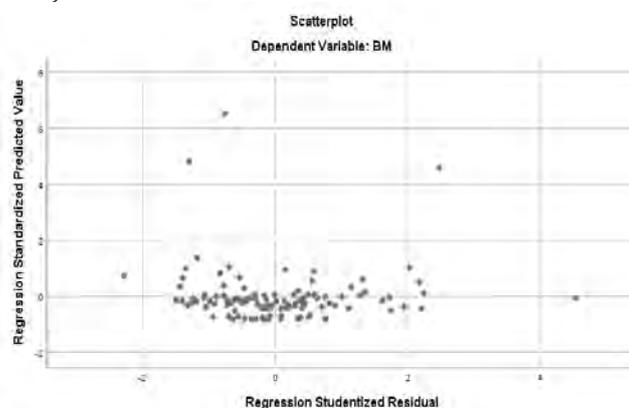
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 ^a	.889	.885	1301.712	1.747

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Dari tabel model *summary* diatas diketahui nilai PAD, DAU dan PE terhadap BM sebesar 1,747. Dengan demikian model regresi memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Suliyanto (2011) heterokedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Dapat diketahui dari grafik *scatterplot* tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam membuat persamaan *regression analysis* dan *hierarchical regression analysis* digunakan bantuan program *SPSS release 20* dengan memasukkan data PAD, DAU terhadap BM dengan PE sebagai variabel moderasi. Berdasarkan prosedur tersebut, konstanta (α) dan koefisien *regression analysis* (β) yang dihasilkan dapat dilihat dari tabel (lampiran).

Berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 5
Regresi PAD, DAU terhadap BM dan PAD*PE, DAU*PE

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	118.762	479.275		2.465	.015		
PAD	.039	.117	.067	.329	.743	.025	4.447
DAU	.306	.057	.235	5.362	.000	.529	1.891
PAD*PE	5.351	.000	.428	3.022	.003	.051	1.709
DAU*PE	1.652	.000	.374	2.494	.014	.045	2.106
PE	4.269	2.556	.898	21.580	.000	1000	1000

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Dari hasil regresi diatas maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$BM = 118,762 + 0,039PAD + 0,306DAU + 4.269 PE + 5,351PAD*PE + 1,652DAU*PE + e$$

Uji F

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α 0,05. Kriteria pengujian, jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka dikatakan tidak Fit yang berarti tidak ada pengaruh secara positif. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka dikatakan Fit yang berarti ada pengaruh secara positif. Hasil uji F antara PAD, DAU dan PE terhadap BM dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

Tabel 6
Uji F
PAD, DAU, PE terhadap BM

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147.000	4	369.000	218.596	.000 ^b
	Residual	184.000	109	169.000		
	Total	166.000	113			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU*PE, DAU, PAD*PE, PAD

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Pada uji F dinyatakan F_{hitung} 218,596 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka model regresi tersebut layak, dan berarti ada pengaruh yang signifikan dan model regresi ini dapat menjelaskan alokasi Belanja Modal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji model yang dilakukan untuk melihat fit atau tidaknya model regresi dilakukan dengan menggunakan nilai R^2 sebagai nilai koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi PAD, DAU, PE terhadap BM dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi
PAD, DAU, PE terhadap BM

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.889	.885	1301.712

a. Predictors: (Constant), DAU*PE, DAU, PAD*PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS maka dapat diketahui R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,889 atau 88,9%. Angka tersebut memberikan arti bahwa BM dipengaruhi oleh faktor PAD, DAU, PAD*PE, dan DAU*PE sebesar 88,9%, sedangkan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Hipotesis (uji t)

Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai t_{tabel} di dapat melalui sig. $\alpha = 0,05$. Hasil uji t PAD, DAU, PE, PAD*PE dan DAU*PE terhadap BM dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

Tabel 8
Uji t
PAD, DAU terhadap BM dengan PE

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	118.762	479.275		2.465	.015		
PAD	.039	.117	.067	.329	.743	.025	4.447
DAU	.306	.057	.235	5.362	.000	.529	1.891
PAD*PE	5.351	.000	.428	3.022	.003	.051	1.709
DAU*PE	1.652	.000	.374	2.494	.014	.045	2.106
PE	4.269	2.556	.898	21.580	.000	1000	1000

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015-2017

Berdasarkan Tabel 8 diatas diketahui bahwa tingkat signifikan variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar $0,743 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak dan H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh PAD terhadap BM. Kedua, tingkat signifikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan diterimanya H_2 dan H_0 ditolak yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap BM. Ketiga, tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di moderasi Pertumbuhan Ekonomi $0,003 < 0,05$. hal ini menunjukkan diterimanya H_3 dan H_0 ditolak yang menyatakan ada pengaruh positif PAD*PE terhadap BM. Kriteria ini tergolong kriteria *Quasi Moderator*, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada output pertama dan pengaruh interaksi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan asli Daerah pada output kedua menyatakan signifikan. Keempat, tingkat signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di moderasi Pertumbuhan Ekonomi $0,014 < 0,05$ hal ini menunjukkan diterimanya H_4 dan H_0 ditolak yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan DAU*PE terhadap BM. Kriteria ini tergolong kriteria *Quasi Moderator*, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada output pertama dan pengaruh interaksi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum pada output kedua menyatakan signifikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan sebesar 0,743 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Selain itu, tingkat

peningkatan dari anggaran belanja modal tergantung pada kondisi dan situasi tiap daerahnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Nurin (2016) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan berbagai pemaparan diatas, maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji t yang terdapat pada tabel 8 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini sepadan dengan penelitian terdahulu Oktora dan Pontoh (2013) menyatakan jika Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Kemandirian pada daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin meningkat. Hal ini memberikan adanya suatu indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal khususnya belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan belanja modal yang diharapkan akan memberikan peningkatan infrastruktur dan memberikan pelayanan publik dan penyeimbangan keuangan antar masing-masing daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil uji t diatas yang terdapat pada tabel 8 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) di moderasi Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM). Kriteria ini tergolong kriteria *Quasi Moderator*, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada output pertama dan pengaruh interaksi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada output kedua menyatakan signifikan.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PE) dinyatakan dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM). Dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi di daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi dan dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi

Berdasarkan hasil uji t diatas yang terdapat pada tabel 8 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) di moderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai signifikan sebesar 0,014 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang berarti H_4 diterima. Kriteria ini tergolong kriteria *Quasi Moderator*, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

pada output pertama dan pengaruh interaksi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum pada output kedua menyatakan signifikan.

Belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ialah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana ketika suatu daerah mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya yang bertujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini senada dengan Nurin (2016) menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dan juga penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) memperoleh hasil yang sama yakni Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 20 menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; (3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal; (4) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Saran

Berdasarkan dari hasil simpulan dan keterbatasan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran-saran dari peneliti : (1) Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian lebih meluas lagi; (2) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih menambah tahun periode dan tahun yang terbaru agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat; (3) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang lain terkait komponen APBD yang belum dibahas pada penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik atau model penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, O. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi* 4(1): 190-205.
- Aryani, P. R. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Darwanto. dan Y. Yutikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.
- Hidayati, N. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Jaya, I. P. N. P. K. dan A. A. N. B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 7(21): 79-92.
- Kawedar, W., A. Rohman dan S. Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Semarang: UNDIP.
- Permanasari, W. A. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. *Artikel Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Permata, Z. W. S. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa* 1(2).
- Sugiarthi. dan Supadmi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 72 (2014): 447-495.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Halim, A. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16(4): 346-357.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. PT Indeks. Jakarta.
- Febriana, S. I. 2015. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-22.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1(2): 142-155.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Se Indonesia. *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.
- <http://www.bps.go.id>
- Nurin, Hidayati. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. ANDI. Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* 9(2): 91-102.
- Susanto, S., dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Bdelanja Modal pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1): 183-191.
- Sholikhah, I. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3(4): 553-562.
- Putro, N. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.